

Daftar Pustaka

- Alias, Anuar., Daud, M.D Nasir. 2006. Payment of Adequate Compensation for Land Acquisition in Malaysia. *Pacific Rim Property Research Journal*, No. 3, Vol. 12, 346.
- Appraisal Institute, 2013. *The Appraisal of Real Estate*, Fourteenth Edition, Appraisal Institute, Chicago, Illinois.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2018. *Kecamatan Peukan Bada Dalam Angka 2018*.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Wisatawan Nusantara 2018*.
- Chan, Nelson., 2006. "Recent Reform of China's Rural Land Compensation Standards." *Pacific Rim Property Research Journal*, No. 1, Vol. 12, 3-21.
- Effendi., 2015. "Analisis Nilai Ganti Kerugian Berbasis Standar Penilaian Indonesia 306 Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Jalan Tol Ruas Depok-Antasari Di Wilayah Krukut Depok)." *Thesis tidak diterbitkan*, Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Harjanto, Budi dan Hidayati, Wahyu, 2015, *Konsep Dasar Penilaian Properti*, BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Holtslag-Broekhof, Sanne., Beunen, Raoul., Marwijk, Ramona, V., Wiskerke, Johannes, S.C., 2018. "Exploring The Valuation Of Compulsory Purchase Compensation." *Journal of European Real Estate Research*, Vol. 11 Issue: 2, pp.187-201.
- Juanda, Bambang, 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Edisi Kedua, IPB Press, Bogor.
- Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia, *Standar Penilaian Indonesia 2018*, Edisi VII, MAPPI, Jakarta.
- MAPPI, 2019. Tabel BTB MAPPI Semester 1 Tahun 2019. <http://www.mappi.or.id>. diakses pada 20 Agustus 2019.
- Margioni, Vince., 2018. "Evaluating the impact of the land acquisition phase on property owners in megaprojects." *International Journal of Managing Projects in Business*, Vol. 11 Issue: 1, pp.158-173.
- Mediatama, G., Riset dan data online. <https://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito/> diakses tanggal 20 Agustus 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032.
- Rao, Jyoti., Tiwari, Piyush., dan Hutchison, Norman, E., 2017. "Capability Approach To Compulsory Purchase Compensation: Evidence Of The Functionings Of Land Identified By Affected Landowners In Scotland." *Journal of Property Research*, No. 4, Vol. 34, 305-324.
- Rencana Strategis, 2015. *Pengembangan destinasi dan industri pariwisata kementerian pariwisata tahun 2015-2019*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Soeratno dan Arsyad, Lincoln, 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Cetakan ke-5, UPP STIM YPKN, Yogyakarta
- Supardi, Untung., Rudianto, Heri B., dan Mukminin LA. 2010. *Penilaian dan Properti*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Yusuf, Hamid, 2016, *Memahami Nilai Penggantian Wajar Penilaian Terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia)*, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Jakarta.